



DIMENSI - DIMENSI STRATEGIS ADMINISTRASI PUBLIK DALAM ISLAM

Maya Wulan Pramesti

Universitas Sultan Fatah, Demak

maya_wulan_pramesti@unisfat.ac.id

ABSTRACT

Strategic Dimensions of Public Administration in Islam. Public administration as the work of government to governance all resources in serving public to gain public welfare. Therefore there are some strategic dimensions concerning to the governance of public administration such as public policy, structure of organization, management, ethic, environment and performance. Those dimensions would not running and inter connected well, when the values are different and bad behaviour such as corruption, laziness, ego, still become apart of public administrators. The value of Islam as the believe to Allah, guide the human to life and work well, dependently or independently. Islam govern the society to runs Allah's rules in their daily life. This paper through literature research tried to explaining how the values of Islam covering the strategic dimensions in public administration. As a moslem country, Indonesia needs to understand how's the values of Islam and how to implement the values in their daily lives.

Keywords: the values of islam, public administration, the work of government.

Pendahuluan

Administrasi publik sebagai *the work of government* mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Frederick A. Cleveland menunjukkan peran penting administrasi publik dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi (Keban, 2008). Administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan peningkatan profesionalisme aparaturanya. Peningkatan profesionalisme berupa penerapan teknik efisiensi dan efektivitas hingga pemerintah dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian tanggung jawab

administrasi publik. Oleh karena itu, terbentuklah apa yang disebut *organized democracy*. Menurut Rondinelli, peran pemerintah saat ini diarahkan kepada melayani masyarakat hingga tercapai *democratic governance* (Rondinelli, 2007). Hal ini dilakukan melalui inovasi, prinsip-prinsip *good governance*, pemanfaatan teknologi, penguatan institusi-institusi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas, pemberdayaan dan kemitraan sektor publik dan swasta.

Tujuan administrasi publik adalah memenuhi kepentingan publik (*public interest*) sehingga apa yang dikerjakan dalam administrasi publik sangat banyak dan sangat bervariasi. Administrasi publik merujuk pada pemerintah sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat (paradigma lama administrasi publik). Dalam paradigma lama administrasi publik, aktor utama adalah birokrat, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang berperan eksklusif untuk mengatur kehidupan masyarakat. Paradigma baru dalam administrasi publik lebih menunjukkan keterbukaan dimana pemerintah tidak lagi dapat bekerja sendiri karena ketidakmampuan menguasai pasar, keterbatasan sumber daya serta tuntutan publik dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Pelibatan berbagai aktor mulai dari masyarakat, pihak swasta, bahkan agen internasional berperan aktif mewarnai perkembangan administrasi publik.

Namun demikian, kegiatan administrasi publik sering kali memiliki peran yang menyimpang dengan tidak mengedepankan tujuan yang seharusnya dicapai. Kepentingan publik sering dikompertisikan dengan kepentingan kelompok politik tertentu dan dalam banyak kesempatan, kepentingan kelompok di atasnamakan sebagai kepentingan publik. Hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya keliru ketika terdapat nilai-nilai yang disepakati (*shared values*) dalam masyarakat. *Shared values* menggambarkan apa yang dianggap bernilai oleh masyarakat atau komunitas dan dinyatakan bernilai oleh masyarakat itu sendiri (Denhardt, 2007, p. -) sehingga hal inilah yang sering disebut dengan kepentingan publik (*public interest*).

Pelaksanaan administrasi publik di Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi mengingat keberagaman agama, suku, budaya, kondisi geografis dan unsur-unsur pembeda lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana administrasi publik untuk dapat menjalankan peran dan mencapai tujuannya, yakni melayani masyarakat sehingga kebutuhannya terpenuhi. Sebagai negara muslim terbesar dunia, maka tidak dapat dielakkan bahwa nilai-nilai keislaman turut mewarnai dalam pelaksanaan administrasi publik di Indonesia. Hal ini tentu sangat wajar dan bahkan menjadi keutamaan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.

Berdasarkan tujuan dan peranannya, terlihat bahwa cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat luas dan kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia. Pelaksana administrasi publik harus dapat memandang nilai-nilai yang disepakati (*shared values*) dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran islam dan norma-norma masyarakat. Untuk itu, pelaksana administrasi publik harus mampu menempatkan dimensi-dimensi strategis administrasi publik dalam masyarakat yang sebagian besar beragama islam, seperti Indonesia. Oleh karenanya, dalam tulisan ini membahas tentang “Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik dalam Islam”.

Metode

Penulisan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan menganalisis tentang dimensi-dimensi strategis administrasi publik dalam Islam. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka, dimana penulis menelusuri, mengumpulkan dan menganalisis beberapa referensi terkait penulisan, seperti buku, jurnal dan *website* yang berkenaan dengan penelitian. Selanjutnya analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif, peneliti mengumpulkan referensi, mencari hubungan antara berbagai konsep, menganalisis, mengembangkan dan menarik kesimpulan untuk dapat menjawab rumusan penelitian. Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan sejumlah referensi terkait antara lain: pengertian administrasi publik, dimensi-dimensi strategis administrasi publik, prinsip-prinsip dalam Islam, pengertian kebijakan, pengertian etika, dan sebagainya.

Kajian Teori

Pengertian Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik telah banyak berubah dari sarwa negara ke sarwa masyarakat (Toha, 2008). Oleh karenanya, pemahaman istilah publik yang dilekatkan pada istilah administrasi dipahami sebagai proses pemerintahan yang selaras dengan perubahan paradigma tersebut. Sebelumnya, pengertian administrasi sangat beragam dari pakar satu dan lainnya. Administrasi menurut Sondang P. Siagian dalam Syafei (2000) diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Syafei, Inu Kencana, 2000). Adapun publik berasal dari kata "*public*" yang artinya umum, masyarakat atau negara.

Pengertian "umum" dapat dilihat dari istilah *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), dan lain sebagainya. Pengertian "masyarakat" dapat dilihat dari istilah *public relation* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat) dan sebagainya. Sedangkan pengertian "negara" dapat dilihat dari istilah *public authority* (otoritas negara), *public revenue* (penerimaan negara) dan lainnya. Syafei (2000) mendefinisikan "publik" itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Dengan demikian, istilah administrasi publik dipahami sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Pemahaman inilah yang pada hakekatnya merupakan jiwa dari administrasi publik yang sejak pertama kali dikembangkan hingga saat ini terjadi perkembangan paradigma-paradigma, dimana eksistensi administrasi publik adalah untuk melayani kepentingan masyarakat (Toha, 2008).

Dimensi-Dimensi Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks dan tergantung dari perkembangan kebutuhan dan dinamika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nicholas Henry dalam Keban (2008) menjelaskan cakupan dari administrasi publik yang meliputi: (1) organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi; (2) manajemen publik, berkenaan dengan sistem, evaluasi, anggaran dan manajemen sumber daya manusia; dan (3) implementasi, berkenaan dengan

kebijakan publik, privatisasi, hubungan antar pemerintah dan etika birokrasi. Shafritz dan Russell (1997) mengupas cakupan administrasi publik dengan lebih detail melalui berbagai unsur-unsur, seperti: (a) lingkungan politik dan budaya; (b) penerapan lanjutan *reinventing government*; (c) hubungan antar lembaga pemerintahan, (d) perkembangan teori manajemen dan organisasi; (e) perilaku organisasi; (f) menajerialisme dan manajemen kinerja; (g) manajemen strategis sektor publik; (h) kepemimpinan dan akuntabilitas; (i) manajemen personalia dan hubungan kerja; (j) keadilan sosial; (k) manajemen keuangan; (l) auditing, akunting dan evaluasi; (m) penghargaan dan etika (Shafritz, 1997).

Keban menyederhanakan cakupan administrasi publik yang sangat luas dalam 6 (enam) dimensi strategis administrasi publik, dimana masing-masing dimensi sangat menentukan dalam pencapaian tujuan (Keban, 2008). Bahkan apabila satu unsur tidak berfungsi dengan baik maka akan mengganggu unsur-unsur lainnya. Ke-enam dimensi administrasi publik tersebut adalah :

a. Dimensi Kebijakan

Shafritz dan Russell mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*a government decides to do or not to do*”, dimana hal ini berkenaan dengan respon terhadap suatu isu politik (Shafritz, 1997). Peterson (2003) berpendapat bahwa kebijakan publik dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”. Oleh karenanya, kebijakan publik memiliki beberapa tahapan, yaitu : penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assesement*) (Dunn, 2004). Adapun beberapa isu terkait dengan kebijakan publik diantaranya: etika kebijakan, reformasi kebijakan publik, partisipasi dalam kebijakan publik, kualitas, efektivitas dan kapasitas kebijakan, serta kepalsuan kebijakan.

b. Dimensi Struktur Organisasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan bagaimana aktivitas-aktivitas organisasi distrukturkan atau dituangkan dalam suatu bentuk struktur dengan tujuan membantu pimpinan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi dapat berbentuk struktur sederhana, struktur birokrasi mesin, struktur birokrasi profesional, struktur divisi, dan struktur *adhocracy*. Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien tidaklah mudah karena sifat dari lingkungan yang bervariasi. Sifat lingkungan ini mulai dari yang paling sederhana hingga kompleks. Dari variasi sifat lingkungan ini, muncul dua bentuk desain organisasi, yaitu organisasi yang bersifat mekanistik dan organisasi yang bersifat organik. Sedangkan isu-isu penting dalam struktur organisasi antara lain: merebaknya gejala parkinson, kompetensi, penentuan posisi atau jabatan, penentuan struktur dan sentralisasi versus desentralisasi.

c. Dimensi Manajemen

Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Manajemen publik membahas aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan fungsi-fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* disatu sisi dan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lainnya. Dalam perkembangannya, manajemen dituntut

akuntabilitasnya melalui akuntabilitas organisasi yang berkenaan dengan transparansi, keberhasilan ataupun kegagalan, dan akuntabilitas individu yang berkenaan dengan profesionalitas administrator publik.

d. Dimensi Etika

Administrasi publik selalu mengingatkan tentang etika karena etika dianalogkan sebagai sistem sensor pada administrasi publik. Bertens dalam Keban (2008) mendefinisikan etika dalam tiga arti penting: (1) nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dalam bertingkah laku (sistem nilai); (2) kumpulan asas atau nilai moral (kode etik); (3) ilmu tentang baik atau buruk (filsafat moral). Etika dalam administrasi publik lebih dikenal dengan administrative responsibility dan di Indonesia lebih dikenal dengan Kode Etik. Dasar kode etik bagi administrator publik di Indonesia adalah Pancasila seta norma etika yang bersifat universal sebagai penuntun tingkah lakunya.

e. Dimensi Lingkungan

Lingkungan diartikan semua faktor yang berada diluar organisasi yang mampu mempengaruhi organisasi. Faktor diluar organisasi tersebut antara lain; kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum serta lingkungan khusus. Lingkungan yang berbeda dalam suatu negara, akan membentuk administrasi publik yang berbeda. Lingkungan Indonesia yang sangat bervariasi membentuk administrasi publik yang berbeda dengan negara-negara lain. Organisasi dapat bertahan hidup ketika mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui perubahan strategi, struktur dan budaya kerja. Adapun beberapa isu penting dalam lingkungan administrasi publik di Indonesia seperti: tantangan dan kondisi Indonesia, tantangan administrasi publik, tantangan ide pembangunan dari Barat serta tantangan good governance yang makin gencar.

f. Dimensi Akuntabilitas Kinerja

Perwujudan komitmen dari akuntabilitas publik ditunjukkan dalam bentuk kinerja, baik kinerja institusi maupun kinerja administrator publik. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian dengan standar yang ada sehingga dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu parameter penilaian kinerja terdiri dari: (1) relevance, yaitu mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan; (2) efisiensi, yaitu perbandingan antara input dengan output; (3) efektivitas, yaitu tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (result) dan final outcomes (impacts); (4) utility and sustainability, yaitu mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts).

Prinsip-prinsip Kehidupan dalam Islam

Islam memiliki prinsip-prinsip kehidupan yang tercermin dari sistem nilai dan sumber-sumber hukum sebagai dasar perilaku kehiduapan kesehariannya. Sistem nilai dalam Islam didirikan atas 3 (tiga) prinsip dasar (Mikailu dan Maishanu, 2008), yaitu : a). Tauhid, menandakan keesaan Allah Yang Maha Tinggi, tiada makhluk yang sebanding dengan Nya yang tak terbatas. Dan karena Dia lah yang menciptakan semuanya. Dia Allah Yang Maha Esa dan tiada sesuatu yang setara dengan Dia. (QS. 112:1,4); b). Khilafah atau kekhalifahan. Prinsip kekhalifahan menuntut manusia untuk melakukan tugasnya sesuai dengan statusnya sebagai khilafah Allah. Manusia pada dasarnya telah ditugaskan untuk menjaga dunia ini

yang merupakan milik Allah (QS. 2:30). Istilah khilafah memiliki 4 (empat) implikasi, yakni: persaudaraan, mempercayai takdir Allah, rendah hati, dan menjamin kebebasan manusia dalam islam; c). *Al-'adl* (keadilan). Prinsip keadilan menuntut setiap umat islam berlaku adil, bahkan terhadap musuh sekalipun. Jadilah penegak keadilan karena Allah menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa (QS. 5:8).

Umat Islam memiliki sumber dan panduan yang sangat jelas dalam kehidupan kesehariannya, dimana seluruh tingkah laku dan aspek kehidupan akan disandarkan kepada sumber tersebut. Sumber-sumber hukum dalam Islam dijelaskan sebagai berikut: 1). Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab yang tidak ada keraguan didalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (QS. 2:2). hal ini menjadi dasar kuat bagi umat Islam untuk melandaskan kehidupannya kepada Al Qur'an; 2). *Hadist*. *Hadist* disebut juga *sunnah* adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. *Hadist* dijadikan sumber hukum islam dimana kedudukan *hadist* sebagai sumber hukum kedua setelah Al Qur'an. *Rasullullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : "Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku"; 3). *Ijma'*. *Ijma'* dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu waktu setelah wafatnya Nabi Muhammad atas hukum syara; 4). *Qiyas*. Secara istilah *ushul fiqh*, *qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *'illat* (hukum). Dengan demikian *qiyas* itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama.

Pembahasan

Hubungan Dimensi-Dimensi Administrasi Publik

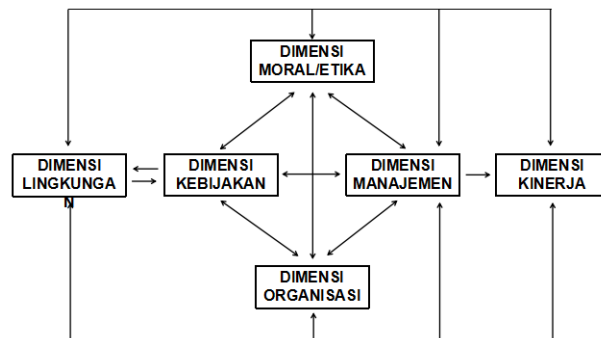
Hubungan antar dimensi strategis administrasi publik memperlihatkan bahwa dimensi lingkungan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh variasi dan dinamika masalah, kebutuhan, aspirasi, potensi, ancaman dan tantangan dari lingkungan. Adapun dimensi kebijakan juga dapat mempengaruhi dimensi lingkungan melalui langkah-langkah yang dilakukan terhadap lingkungan. Lingkungan juga dapat mewarnai struktur organisasi dan manajemen serta moral dan etika. Diakui pula bahwa lingkungan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja, tanpa melalui kebijakan, manajemen, struktur organisasi, moral dan etika.

Hubungan antara dimensi kebijakan, manajemen, struktur organisasi dan moral dapat dilihat dalam proses administrasi. Kebijakan yang merupakan keputusan untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu dari pemerintah dan keputusan ini dipengaruhi moral dan etika dari pejabat. Moral dan etika yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik, sebaliknya, moral dan etika pejabat yang buruk akan menghasilkan keputusan yang berdampak negatif bagi publik. Adapun hubungan struktur organisasi dan manajemen terhadap kebijakan terlihat dari pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik, namun tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena struktur organisasi dan manajemen tidak berjalan dengan baik. Struktur organisasi dan manajemen merupakan

serangkaian dimensi yang tidak terpisahkan dimana keduanya sangat terlihat perannya dalam organisasi.

Struktur organisasi yang profesional akan membuat organisasi berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota organisasi, garis kewenangan yang jelas serta koordinasi dan komunikasi antar anggota dengan pimpinan terjalin dengan baik. Manajemen terlihat dari gaya kepemimpinan yang dianut, dimana seorang pimpinan/manajer bergaya demokratis ataukah otoriter. Gaya kepemimpinan demokratis akan menghasilkan struktur sengan garis komunikasi dua arah, sedangkan gaya kepemimpinan otoriter hanya satu arah. Kelima hubungan dimensi dalam administrasi publik mempengaruhi kinerja administrasi publik. Gambar 1 menunjukkan bahwa ke-enam unsur saling memiliki keterkaitan. Apabila kinerja administrasi publik pada suatu saat buruk, maka dapat ditelusuri penyebabnya dari lima dimensi yang ada. Hal ini karena hubungan yang terjalin antar dimensi bersifat strategis karena sebagian besar permasalahan kinerja administrasi publik dapat berawal dari masalah pada salah satu dimensi.

Gambar 1 - Saling Hubungan Antar Dimensi Strategis Administrasi Publik



Sumber : Keban (2008: 13)

Dimensi-Dimensi Administrasi Publik dalam Islam

Dimensi-dimensi strategis dalam administrasi publik untuk mencapai tujuan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas sangat sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Hal ini karena Islam memuat dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Sejumlah teoritis mengakui bahwa nilai-nilai Islam turut mempengaruhi administrasi publik, seperti kinerja, etika, akuntabilitas (ElKaleh, 2013) hingga *good governance* (Samier, 2017). Lebih lanjut, ada konsensus di antara para ilmuwan administrasi publik bahwa ada peran yang signifikan mengenai nilai-nilai Islam yang berpengaruh dalam meningkatkan kualitas kerja dan efektivitas organisasi, berkontribusi terhadap masyarakat yang berkembang dan stabil serta pertumbuhan ekonomi dan pembatasan faktor-faktor signifikan lainnya, seperti perselisihan sosial dan perang, dimana nilai-nilai islam dapat mengintervensi (ElKaleh, 2013). Metcalfe dan Murfin (2011) berpendapat bahwa penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam dan mengikuti jalan sekuler Barat mengakibatkan “kegagalan masyarakat Muslim”. Mereka percaya bahwa pembaruan sosial “membutuhkan kembalinya ke Islam”(Metcalfe, B. and Murfin, 2011).

Dimensi Kebijakan

Kebijakan publik dalam Islam berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang amanah. Pemerintah yang amanah merupakan prinsip utama

karena apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka hancurlah wilayah bahkan negara yang dipimpinnya. Begitu penting dan beratnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang amanah, maka Allah berfirman :”Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. 33: 72-73). Dengan demikian, kebijakan dalam Islam harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tidak hanya pada keinginan politik elit tertentu saja.

Dimensi Struktur Organisasi

Islam senantiasa mendorong pemeluknya melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, karena bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir rapi akan dengan mudah bisa dirusak oleh kebatilan yang tersusun rapi, demikian kutipan dari Ali Bin Abi Thalib. Islam juga mengingatkan umatnya agar segala pekerjaan yang akan dilakukan, dikoordinasi dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi, laksana bangunan yang tersusun dengan kokoh dan rapi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam QS.61:4, “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang (berjuang) dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. Dengan demikian, struktur organisasi yang ada dalam administrasi publik, jauh sebelumnya telah ditata dalam peradaban islam.

Dimensi Manajemen

Manajemen dalam sudut pandang Islam merupakan *al-tadbir*, derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang salah satunya terdapat dalam Al Qur’an : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (QS. 32 : 05). Fungsi manajemen seperti *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan), dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an dan Hadits. *Pertama, Planning* (perencanaan). Konsep Islam dalam Al Qur’an tentang pentingnya perencanaan adalah : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. 59:18)”; *Kedua, Organizing* (pengorganisasian). Proses organisasi harus memperhatikan strategi dan ketepatan alokasi sumberdaya sebagaimana terdapat dalam QS. 3:121, yang berbunyi “Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”; *Ketiga, Actuating* (pelaksanaan). Istilah lain dari pelaksanaan adalah *directing commanding, leading* dan *coordinating*. Dalam Islam, pelaksanaan merupakan ketaatan terhadap Tuhan dan Pimpinan sebagaimana disebutkan “Dan taatilah Allah dan RasulNya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar

(QS. 8 : 46); Keempat, *Controlling* (pengawasan). Fungsi pengawasan adalah menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Islam, Allah merupakan pengawas tertinggi dimana semua tindakan akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam QS. 42: 6, “Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka”.

Dimensi Etika

Etika dalam Islam adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad, yang di dalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Akhlak merupakan pola tingkah laku yang mengakumulasikan aspek keyakinan dan ketaatan sehingga menggambarkan perilaku yang baik (tutur kata dan perbuatan). Rasulullah SAW adalah uswah alhasanah (teladan yang baik) sebagaimana firman Allah SWT, “Sesungguhnya pribadi Rasulullah merupakan teladan yang baik untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhirat dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya” (QS. 33:21) dan terdapat pula dalam QS. 68:4 “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung”.

Dimensi Lingkungan

Kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya merupakan lingkungan eksternal yang ada di suatu negara. Keberagamannya tidak dapat dihindari dan keberadaannya membuat pertimbangan tersendiri bagi administrasi publik untuk dapat menanganinya dengan baik. Dalam Islam, keberagaman adalah suatu ketetapan bagi manusia dan manusia harus dapat memahami keberagaman lingkungan untuk saling mengenal dan berbuat kebaikan. Hal ini merupakan bentuk ketakwaan terhadap Allah, sebagaimana Firman Allah : “Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti” (QS. 49: 13)

Dimensi Kinerja

Dalam kinerja, Islam mengajarkan tentang akuntabilitas dan transparansi, karena semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan untuk sesama manusia. Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan orang lain (muamalah) harus dilakukan dengan transparan, tercatat dan tidak manipulatif. Akuntabilitas adalah nilai dasar manusia berupa pertanggungjawaban semua tindakan dan pekerjaan yang telah manusia lakukan. Sebagaimana ayat dalam Al Qur’an yang berbunyi: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?” (QS. 75 : 36), dan “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan & hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. 17 : 36) .

Adapun tuntunan Islam agar manusia bekerja secara transparansi adalah selalu dicatat dan didokumentasikan pekerjaannya secara benar, tidak manipulatif. Hal ini terdapat dalam Al Qur’an

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. 2 : 282)

Demikianlah Islam mengatur seluruh aspek-aspek manusia, tidak terkecuali dengan dimensi-dimensi strategis yang ada dalam administrasi publik. Islam memiliki sumber ketetapan yang sangat sempurna dan tidak diragukan, yakni Al Qur’an yang berfungsi sebagai pedoman kehidupan manusia. Sebagai suatu ajaran yang sempurna, Islam memberi panduan yang lurus dan universal, dimana setiap manusia akan dapat menerima dengan hati yang bersih. Dimensi-dimensi strategis administrasi publik yang masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya, terutama di Indonesia, dapat memasukkan nilai-nilai Islam guna memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Simpulan

Dimensi-dimensi strategis administrasi publik berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam maka sudah semestinya pelaksanaan administrasi publik mengelaborasi nilai-nilai Islam dalam administrasi publik. Pemahaman administrasi publik dari pandangan barat (*western*) tidak mendominasi sepenuhnya tata kelola publik di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pimpinan negara perlu mengkolaborasi dimensi-dimensi strategis administrasi publik dengan prinsip-prinsip Islam.

Sangat penting bagi para administrator publik untuk memahami dimensi-dimensi administrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dikarenakan tugas utama mereka adalah memenuhi kebutuhan masyarakat (mayoritas Islam). Tidak bijak apabila administrator publik hanya mengetahui administrasi publik secara teoritis yang mana sumber ilmu ini adalah aliran barat (*western*). Pemahaman nilai-nilai Islam dalam dimensi-dimensi administrasi publik perlu difokuskan bahkan diimplementasikan melalui kebijakan, struktur organisasi, manajemen, lingkungan, etika dan kinerja administrator publik. Tamim bin Aus Ad Dari, bahwa Nabi saw. bersabda: “Islam itu (berisikan) nasehat. Kami bertanya: ‘Nasehat bagi siapa?’ Nabi menjawab: ‘Nasehat (untuk mentaati) Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya dan nasehat untuk menyadarkan para pemimpin umat Islam dan seluruh kaum muslim.” (HR. Muslim)

Daftar Pustaka

- Denhardt, J. . and R. B. D. (2007). *The New Public Service: Serving, not Steering* (Expanded E). New York: M. E. Sharpe.
- Dunn, W. N. (2004). *Public Policy Analysis: An Introduction* (Third Edit). Upper Saddle River: N.J: Pearson Prentice-Hall.
- ElKaleh, E. and E. A. S. (2013). The Ethics of Islamic Leadership: A Cross-Cultural Approach for Public Administration. *Administrative Culture*, 14 (2), 188–211.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Metcalf, B. and Murfin, T. (2011). *Leadership, Social Development and Political Economy in the Middle East: An Introduction,*” in B. Metcalfe and F.Mimouni (eds) *Leadership Development in the Middle East*. Glos: Edward Elgar Publishing Limited.
- Rondinelli, D. . (2007). *Governments Serving People: The Changing Role of Public Administration in Democratic Governance, dalam Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens*. New York: United Nations: Economis and Social Affairs.
- Shafritz, J. . dan E. W. R. (1997). *Introducing Public Administration* (Chapter 1). New York: Addison-Weasly Educational Publisher Inc.
- Syafei, Inu Kencana, D. (2000). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

